

PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BPK DI KOTA PALU

Fadil Sukri

fadilghaniy@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The aim of the research is to find out the difference of perceptions among financial statement users that include the government working units, legislative representative, and academics, Sample consists of 35 people consisting of 22 heads of the government working units, 8 legislatives, and 5 academics. Research method is descriptive qualitative and quantitative. Data of analysis uses Anova One-Way to test several indicators such as: 1) the length of audit, 2) the independence of the audit fees, 3) the limited time of the assignment of auditors, 4) kinship, 5) the tendency to straddle because of political beliefs or social, 6) the access to information without barriers, and 7) the freedom of determining the contents of the report, time reporting, as well as publishing and disseminating the report. The result concludes that 1) different perceptions exist in three groups of financial users, 2) of 7 indicators, there is one factor that shows different perception towards auditor independency that is 'the limited time of the assignment of the auditor.

Keywords: *Financial statement users, the government working units, legislative representative, academics, and auditor independency*

Terjadinya reformasi tahun 1998, telah mengubah kebijakan baru pemerintah Indonesia dengan mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah (Abdul Halim, 2007). Tentunya hal ini memberikan perubahan yang besar terhadap perkembangan sektor publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk juga di dalamnya reformasi pemeriksaan dan pengelolaan tanggungjawab keuangan Negara.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk penyelenggaraan pemerintahan dimaksud, pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat, kemudian membelanjakannya untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada rakyat. Dalam hal ini kedudukan pemerintah adalah sebagai agen dari rakyat, sedangkan rakyat sebagai prinsipalnya. Sebagai agen, pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada rakyat yang diwakili oleh DPR/DPRD.

Pola hubungan antara Pemerintah sebagai agen dan DPR sebagai wakil dari prinsipal, terdapat ketidakseimbangan pemilikan informasi (*asimetry information*). Lembaga perwakilan tidak mempunyai informasi secara penuh apakah laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dari eksekutif telah mencerminkan kondisi yang sesungguhnya; atau apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban telah sesuai semua peraturan perundangundangan; atau apakah pengelolaan telah menerapkan sistem pengendalian intern secara memadai dan pengungkapan secara paripurna. Oleh karena itu diperlukan pihak yang kompeten dan independen untuk menguji laporan pertanggungjawaban tersebut. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Audit sektor publik atau pemeriksaan keuangan entitas publik merupakan proses penilaian kolektif oleh stakeholders atas semua aspek aktivitas dan program yang diselenggarakan oleh organisasi atau kelompok.

Tujuan pemeriksaan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari rerangka institusional untuk mendukung tercapainya good public governance (GPG). Tidak seperti pada sektor privat, investor, kreditor, dan pemerintah sangat menuntut adanya audit.

Audit pemerintah atau audit sektor publik muncul karena adanya tuntutan hukum dan peraturan (Halim, 2007), kelompok masyarakat yang berkepentingan (Halim, 2007). Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah yang diaudit mencerminkan kepatuhan suatu lembaga pemerintah terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan informasi yang berguna untuk publik. Dalam auditnya, akuntan pemerintah menilai apakah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku umum. Sebagai hasil auditnya, akuntan pemerintah memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan. Pendapat akuntan pemerintah ini disajikan dalam "Laporan Auditor Independen".

Kualitas audit penting untuk pihak internal dan eksternal, kepuasan auditee merupakan pusat dari profesi akuntansi (Bhattacharya, 2001). Pemakai laporan menaruh harapan besar atas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pemerintah. Pemeriksaan yang baik akan memberikan keyakinan kepada publik terhadap aktivitas dan program yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan dengan harapan dan memenuhi Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat serta tentunya bebas dari penyimpangan.

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam melaksanakan audit bukan semata hanya untuk kepentingan klien tetapi juga pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Mardiasmo (2002) mengidentifikasi sepuluh pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu: (1) pembayar pajak (tax payer), (2)

penyedia dana bantuan (grantors), (3) investor, (4) pemakai jasa (fee-paying service recipients), (5) Karyawan/ pegawai, (6) pemasok (vendors), (7) dewan legislatif, (8) manajemen, (9) pemilih (voters), (10) badan pengawas (oversight bodies).

Menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) tahun 2005, terdapat beberapa kelompok utama pemakai laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: (1) Masyarakat; (2) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan (4) Pemerintah.

Halim (2007) secara spesifik mengemukakan pihak-pihak eksternal Pemerintah Daerah sebagai pemakai laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah: (1) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), (2) Badan Pengawas Keuangan, (3) Investor, Kreditor, dan Donatur, (4) Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah, (5) Rakyat, (6) Pemerintah Pusat, (7) Pemerintah Daerah Lain.

Pemakai utama laporan keuangan daerah di Indonesia adalah masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas/Pemeriksa, komponen yang berpartisipasi dalam proses pendanaan pemerintah daerah yaitu pembayar pajak dan pemerintah lain (pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, disebutkan "laporan keuangan untuk tujuan umum adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakai". Yang dimaksud dengan pemakai adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Underwriters mungkin tidak umum terdengar, tetapi lain halnya untuk kepentingan para analis.

Analis dan lembaga penelitian menggunakan laporan keuangan daerah untuk menurunkan laporan hasil penelitian mereka berkaitan dengan perkembangan ekonomi

makro nasional. Laporan keuangan daerah yang memiliki keterbandingan dari tahun ke tahun dapat menghasilkan statistik keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal daerah dan nasional.

Pemakai laporan keuangan yang lain adalah kreditor dan investor. Kreditor berkepentingan terhadap laporan keuangan daerah karena memberikan pinjaman daerah kepada pemerintah daerah. Hal mengenai pinjaman daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 169 menjelaskan “untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akuntan pemerintah memiliki posisi yang strategis di mata pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, Kepercayaan yang besar pemakai laporan keuangan auditan akhirnya mengharuskan akuntan pemerintah memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya. Karena kualitas menunjukkan kepercayaan publik atas pemerintahan. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi (Christiawan, 2002). Mardiasmo (2002), juga menyatakan bahwa salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan proses audit kinerja pada organisasi sektor publik (pemerintahan) adalah independensi antara auditor dan *auditee*.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: Persepsi pemakai laporan keuangan terhadap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian survei yang merupakan bentuk dari penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sering juga disebut sebagai penelitian survei karena salah satu ciri dari penelitian ini yaitu dilakukan secara survei. Sugiyono (2010) mengungkapkan

bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi penelitian ini juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Penelitian ini juga bersifat komparatif dan korelatif.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah

1. Pejabat pemerintah daerah selaku pemakai internal dan penyusun laporan keuangan.
2. Anggota DPRD selaku pemakai yang akan menilai dan mengawasi kinerja pemerintah.
3. Akademisi, selaku analis eksternal yang berkepentingan dengan penelitian, kritisi kebijakan dan kajian akademik.

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi (Ridwan dan Kuncoro, 2007:30). Responden yang menjadi sampel penelitian yaitu :

1. Pejabat pemerintah daerah selaku pemakai internal dan penyusun laporan keuangan, sampel akan diambil dari, dinas, badan dan biro
2. Anggota DPRD selaku pemakai yang akan menilai dan mengawasi kinerja pemerintah. Anggota DPRD yang dijadikan sampel yaitu yang berhubungan langsung dengan informasi keuangan seperti komisi atau panitia kerja yang terwakilkan dari fraksi-fraksi dan partai politik.
3. Akademisi, selaku analis eksternal yang berkepentingan dengan penelitian, kritisi kebijakan dan kajian akademik. Akademisi yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Dosen pengampuh mata kuliah akuntansi lebih khususnya pengampuh mata kuliah akuntansi sektor public atau akuntansi pemerintahan.

Operasional variabel dalam penelitian ini adalah persepsi terhadap independensi auditor BPK yang merupakan hasil dari suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan independensi auditor BPK itu sendiri. Gambaran tersebut diperoleh melalui proses pengindraan dan melibatkan pengalaman-pengalaman orang lain serta

informasi-informasi yang didapat sehingga mempengaruhi dalam memberikan persepsinya tentang Independensi auditro. Persepsi masyarakat pemakai laporan keuangan diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dan dikembangkan oleh Supriyono (2008) yang berisi dua bagian, yaitu bagian A berisi data responden dan bagian B berisi pertanyaan tentang independensi auditro. Independensi auditor merupakan objek yang dipersepsi sehingga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyono (2008), maka indikator yang akan diukur adalah:

1. Lamanya penugasan audit.
2. Independensi dalam biaya audit.
3. Terbatasnya waktu penugasan yang disediakan bagi auditor BPK.
4. Hubungan kekeluargaan.
5. Adanya kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau social.
6. Akses terhadap informasi tanpa hambatan.
7. Kebebasan menentukan sendirimateri laporan dan waktu melaporkan serta kebebasan menerbitkan dan menyebarluaskan laporan-laporan hasil pemeriksaan.

Setelah definisi operasional dikembangkan, perlu dinyatakan dalam skala. Untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa kuat perasaan, perilaku, suatu persepsi seseorang mengenai suatu hal, maka skala untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Menurut Sugiyono (2010), skala ordinal mengelompokkan variabel sedemikian rupa guna menunjukkan perbedaan kualitatif yang bersifat tingkatan atau urutan seperti preferensi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.

Pengukuran terhadap variabel di atas menggunakan skala *likert* 1 - 5 poin. Dimana untuk skala *likert* poin 1 menunjukkan Sangat Mempengaruhi, sedangkan skala *likert* poin 5 Sangat Tidak Mempengaruhi. Alasan menggunakan skala *likert* karena skala tersebut dapat membedakan subjek yang diamati berdasarkan perbedaan derajat ciri ordinal yang mereka miliki secara khas terwujud dalam gejala kesikapan, menurut Sugiyono (2010).

Pengumpulan data merupakan suatu prosedur standar dan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dimana data tersebut harus cukup valid dan dijamin kebenarannya. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Kuesioner, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pernyataan/pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden. Kuesioner disebar secara langsung oleh peneliti kepada Masyarakat Pemakai Laporan Keuangan yang menjadi responden.
2. Wawancara, merupakan suatu pendekatan yang dilakukan guna melengkapi data kuesioner yang dilakukan. Mengadakan tanya jawab langsung dengan yang menjadi responden.
3. Observasi, merupakan suatu pendekatan dimana dilakukan pengamatan secara langsung pada mahasiswa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
4. Studi dokumen, merupakan pengumpulan data sekunder melalui buku-buku/literatur atau dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

Setelah data yang diperlukan diperoleh, dilakukan pengolahan dengan cara menyusun data dan disesuaikan dengan variabel yang akan diteliti. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis deskriptif dan interpretasi sehingga data tersebut jadi lebih berarti. Sugiyono (2010) mengungkapkan bahwa analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data-data dikumpulkan dan digolongkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara objektif. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan antar kelompok responden, karenanya pengujian yang digunakan adalah *anova one-way* dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows* versi 16.0.

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan jawaban dari suatu permasalahan (Sugiyono, 2010). Untuk itulah, pengumpulan data perlu dilakukan untuk memastikan apakah

hipotesis yang ditarik tersebut telah benar atau belum. Penerimaan atau penolakan atas hipotesis tergantung dari hasil analisis data di lapangan. Jika hasil analisis data di lapangan sesuai dengan teori berarti hipotesis tersebut dapat diterima. Hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata diantara tiga kelompok sampel yaitu persepsi antara pejabat pemerintah, Anggota DPRD, dan Akademisi terhadap independensi auditor. Karena diantara masing-masing kelompok sampel yang diuji saling independen maka pengujian dilakukan dengan alat analisis anova one way dengan tingkat signifikansi sebesar sama dengan atau lebih kecil dari 0.05 ($\rho \leq 0.05$). Uji anova one-way digunakan untuk menentukan apakah kelompok sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda secara signifikan.

Standar error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal. Sehingga tujuan uji beda anova one-way adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Uji signifikansi dilakukan dengan menguji lebih dahulu asumsi apakah varians kedua sampel tersebut sama (*equal variance assumed*) ataukah berbeda (*equal variance not assumed*) dengan melihat nilai Levene's Test for Equity Variance. Apabila nilai Levene's Test for Equity Variance menunjukkan tingkat signifikansi diatas Sign 0.05 ($\rho > 0.05$), dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara varians pada dua grup sampel. Dari pemaparan di atas dapat dirangkum bahwa dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika probabilitas > 0.05 maka H_0 tidak dapat ditolak sehingga H_a ditolak. Jadi varians sama.
2. Jika probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Jadi varians berbeda.

Pada penelitian ini *level confidence* adalah 95% dengan level toleransi kesalahan sebesar 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Jawaban Responden Berdasarkan Kelompok Pemakai Laporan Keuangan

Pada bagian ini, peneliti menguraikan hasil tabulasi untuk masing-masing kelompok pemakai laporan keuangan berdasarkan indikator-indikator yang telah diuraikan di bab metode penelitian. Adapun jumlah pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 12 pertanyaan.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa yang memperoleh skor tertinggi adalah pernyataan nomor item 9 dan 10 yaitu : "Adanya kecenderungan memihak karena keyakinan politik merusak independensi auditor dan Campur tangan pihak eksterent dalam penentuan prosedur pemeriksaan merusak independensi auditor" dengan total skor masing-masing sebesar 140 dan 140.

Berdasarkan hal tersebut sebagian besar responden setuju dengan pernyataan "Adanya kecenderungan memihak karena keyakinan politik merusak independensi auditor dan Campur tangan pihak eksterent dalam penentuan prosedur pemeriksaan merusak independensi auditor". Hal ini tergambar dari hasil tabulasi kuesioner yang dikumpulkan dari responden yang menunjukkan sebagian besar mereka menjawab setuju atas item pertanyaan tersebut. Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa di dalam instansi pemerintahan Campur tangan pihak eksterent dalam penentuan prosedur pemeriksaan merusak independensi auditor.

Pernyataan dengan nomor item 3 yang berbunyi " Anggaran BPK yang bersumber dari APBN merusak Independensi Auditor" merupakan pernyataan yang memiliki skor terendah dengan total skor 100. Pada pernyataan tersebut, sebanyak 2 responden atau 5.7% menjawab sangat setuju, 7 responden atau 20% menjawab setuju, 10 responden atau 28.6% menjawab netral, 16 responden atau 45.7 % menjawab tidak setuju dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan hal tersebut memberikan gambaran bahwa responden menganggap anggaran BPK yang bersumber dari APBN tidak merusak independensi BPK dapat dilihat dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab tidak setuju atas pernyataan no item 8, hal ini juga menggambarkan bahwa anggaran yang digunakan BPK yang bersumber dari APBN tidak mempengaruhi buruknya independensi BPK.

Deskripsi Tabulasi Frekuensi Untuk Lingkungan DPRD

Jawaban atas pemakai laporan keuangan dari kelompok Anggota DPRD yang berasal dari responden dan terdiri dari 12 item pernyataan. Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa dalam dalam kelompok Anggota DPRD yang memperoleh skor tertinggi adalah pernyataan nomor item 9 yaitu : “Adanya kecenderungan memihak karena keyakinan politik merusak independensi auditor” dengan total skor 38, sebanyak 6 responden atau 75% menjawab sangat setuju, 2 responden atau 25% menjawab setuju, sedangkan untuk jawaban netral, tidak setuju dan setuju 0 responden.

Berdasarkan hal tersebut sebagian besar responden setuju dengan pernyataan “Adanya kecenderungan memihak karena keyakinan politik merusak independensi auditor”. Hal ini tergambar dari hasil tabulasi kuesioner yang dikumpulkan dari responden yang menunjukkan sebagian besar mereka menjawab setuju atas item pertanyaan tersebut. Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa dikalangan anggota DPRD berpendapat bahwa Adanya kecenderungan memihak karena keyakinan politik merusak independensi auditor.

Pernyataan dengan nomor item 3 yang berbunyi ” Anggaran BPK yang bersumber dari APBN merusak Independensi Auditor” merupakan pernyataan yang memiliki skor terendah dengan total skor 25. Pada pernyataan tersebut, sebanyak 1 responden atau 12.5% menjawab sangat setuju, 2 responden atau 25 % menjawab setuju, 2 responden atau 25% menjawab netral, 3 responden atau 37.5 %

menjawab tidak setuju dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan hal tersebut memberikan gambaran bahwa responden menganggap anggaran BPK yang bersumber dari APBN tidak merusak independensi BPK dapat dilihat dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab tidak setuju atas pernyataan no item 8, hal ini juga menggambarkan bahwa anggaran yang digunakan BPK yang bersumber dari APBN tidak mempengaruhi buruknya independensi BPK.

Deskripsi Tabulasi Frekuensi Untuk Kelompok Pimpinan SKPD

Jawaban atas pemakai laporan keuangan dari kelompok SKPD yang berasal dari responden dan terdiri dari 12 item pernyataan. Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa dalam dalam kelompok SKPD yang memperoleh skor tertinggi adalah pernyataan nomor item 10 yaitu : “Campur tangan pihak eksterent dalam penentuan prosedur pemeriksaan merusak independensi auditor” dengan total skor 83, sebanyak 5 responden atau 22.7% menjawab sangat setuju, 9 responden atau 40.95 % menjawab setuju, 6 responden atau 27.3 % menjawab netral, 2 responden atau sebanyak 9.09 % menjawab tidak setuju dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan hal tersebut sebagian besar responden setuju dengan pernyataan “Campur tangan pihak eksterent dalam penentuan prosedur pemeriksaan merusak independensi auditor”. Hal ini tergambar dari hasil tabulasi kuesioner yang dikumpulkan dari responden yang menunjukkan sebagian besar mereka menjawab setuju atas item pertanyaan tersebut. Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa di dalam instansi pemerintahan Campur tangan pihak eksterent dalam penentuan prosedur pemeriksaan merusak independensi auditor.

Pernyataan dengan nomor item 3 yang berbunyi ” Anggaran BPK yang bersumber dari APBN merusak Independensi Auditor” merupakan pernyataan yang memiliki skor terendah dengan total skor 59. Pada pernyataan

tersebut, sebanyak 0 responden menjawab sangat setuju, 4 responden atau 18,2 % menjawab setuju, 7 responden atau 31,8% menjawab netral, 11 responden atau 50 % menjawab tidak setuju dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan hal tersebut memberikan gambaran bahwa responden menganggap anggaran BPK yang bersumber dari APBN tidak merusak independensi BPK dapat dilihat dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab tidak setuju atas pernyataan no item 8, hal ini juga menggambarkan bahwa anggaran yang digunakan BPK yang bersumber dari APBN tidak mempengaruhi buruknya independensi BPK.

Deskripsi Tabulasi Frekuensi Untuk Kalangan Akademisi

Jawaban atas pemakai laporan keuangan dari kalangan akadeisi yang berasal dari responden dan terdiri dari 12 item pernyataan. Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa dalam kalangan akademisi yang memperoleh skor tertinggi adalah pernyataan nomor item 1 dan 6 yaitu : “(1) Penugasan Audit diatas 5 tahun merusak independensi auditor” dengan total skor 22, sebanyak 3 responden atau 60% menjawab sangat setuju, 1 responden atau 20% menjawab setuju, 1 responden atau 20% menjawab netral, sedangkan untuk jawaban tidak setuju dan setuju 0 responden. Untuk pertanyaan nomor 6 yaitu : “Memiliki Hubungan pertalian darah dengan menejemen entitas akan merusak independensi auditor” dengan total skor 22, sebanyak 3 responden atau 60% menjawab sangat setuju, 1 responden atau 20% menjawab setuju, 1 responden atau 20% menjawab netral, sedangkan untuk jawaban tidak setuju dan setuju 0 responden.

Berdasarkan hal tersebut sebagian besar responden dari kalangan akademisi setuju dengan pernyataan “Penugasan Audit diatas 5 tahun merusak independensi auditor dan Memiliki Hubungan pertalian darah dengan menejemen entitas akan merusak independensi

auditor”. Hal ini tergambar dari hasil tabulasi kuesioner yang dikumpulkan dari responden yang menunjukkan sebagian besar mereka menjawab setuju atas item pertanyaan tersebut. Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa dikalangan akademisi berpendapat bahwa lamanya penugasan audit diatas 5 tahun dan adanya hubungan pertalian darah dapat merusak independensi BPK.

Pernyataan dengan nomor item 5 yang berbunyi ” Keterbatasan sumber daya yang diberikan kepada auditor BPK merusak Independensi Auditor” merupakan pernyataan yang memiliki skor terendah dengan total skor 11. Pada pernyataan tersebut, sebanyak 0 responden menjawab sangat setuju, 1 responden atau 20 % menjawab setuju, 0 responden menjawab netral, 3 responden atau 60 % menjawab tidak setuju dan 1 responden atau 20% menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan hal tersebut memberikan gambaran bahwa responden dari kalangan akademisi menganggap bahwa keterbatasan sumber daya yang diberikan kepada auditor BPK tidak merusak independensi BPK, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab tidak setuju atas pernyataan no item 5.

Pengujian Kualitas Data

Uji Validitas

Hasil uji validitas terhadap kuisisioner penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari 12 item pernyataan yang persepsi pemakai laporan keuangan terhadap independensi auditor BPK dilakukan dengan bantuan computer program *SPSS for windows versi 16.0*

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas

Item Pernyataan	r-hitung	r-kritis	Status
1	0,59	0,334	Valid
2	0,47	0,334	Valid
3	0,44	0,334	Valid
4	0,41	0,334	Valid
5	0,54	0,334	Valid
6	0,67	0,334	Valid
7	0,79	0,334	Valid
8	0,79	0,334	Valid
9	0,82	0,334	Valid
10	0,64	0,334	Valid
11	0,61	0,334	Valid
12	0,61	0,334	Valid

Sumber : Data Olahan 2016

Uji Reliabilitas

Setelah seluruh instrumen dalam penelitian ini dinyatakan valid, maka selanjutnya diadakan pengujian reliabilitas untuk menguji keandalan instrumen penelitian. Uji reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan bantuan program *SPSS for windows versi 21.0*.

Adapun alat analisisnya menggunakan metode *cronbach.s alpha*. Menurut Ghazali (2007:42) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai hasil statistik atau koefisien lebih dari 0,60.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No	Variabel	Pernyataan	Cronbach Alpha (α)	Ket.
1	Independensi	12	0,855	Reliabel

Sumber : Data Olahan 2016 (lampiran III)

Berdasarkan tabel 3.28 dapat dilihat bahwa *Cronbach Alpha (α)* pada variabel *Independensi* lebih besar dari 0,60 dengan nominal sebesar 0,855, maka variabel dapat dikatakan reliabel karena memiliki nilai koefisien lebih dari 0,60.

Hasil Pengujian Hipotesis

Lamanya Penugasan Audit

Pengujian ini ingin melihat, apakah rata-rata ke tiga kategori responden berasal dari populasi yang sama dengan asumsi varian masing-masing adalah sama. Dari pengujian terlihat bahwa *Levene tes* hitung adalah 9.912 dengan nilai probabilitas 0.067. Oleh karena probabilitasnya > 0.05 maka dapat dikatakan terdapat kesamaan varians pada ketiga sampel,

dengan demikian asumsi kesamaan varians terpenuhi.

Berdasarkan hasil tes untuk faktor independensi dalam biaya audit tersebut terlihat bahwa *F* hitung adalah 2.392 dengan probabilitas 0.108. Oleh karena probabilitas > 0.05 atau persepsi ke tiga kelompok (SKPD, anggota DPRD, dan Akademisi) terhadap pernyataan lamanya penugasan audit BPK tidak berbeda nyata.

Independensi dalam biaya pemeriksaan

Pengujian ini ingin melihat, apakah rata-rata ke tiga kategori responden berasal dari populasi yang sama dengan asumsi varian masing-masing adalah sama. Dari pengujian terlihat bahwa *Levene tes* hitung adalah 1.735 dengan nilai probabilitas 0.193. Oleh karena

probabilitasnya > 0.05 maka dapat dikatakan terdapat kesamaan varians pada ketiga sampel, dengan demikian asumsi kesamaan varians terpenuhi.

Berdasarkan hasil tes untuk faktor Independensi dalam biaya pemeriksaan tersebut terlihat bahwa F hitung adalah 2.392 dengan probabilitas 0.108. Oleh karena probabilitas >0.05 atau persepsi ke tiga kelompok (SKPD, anggota DPRD, dan Akademisi) terhadap pernyataan independensi dalam biaya audit BPK tidakberbeda nyata.

Terbatasnya waktu penugasan dan sumberdaya yang disediakan Bagi Auditro BPK

Pengujian ini ingin melihat, apakah rata-rata ke tiga kategori responden berasal dari populasi yang sama dengan asumsi varian masing-masing adalah sama. Dari pengujian terlihat bahwa levene tes hitung adalah 1.769 dengan nilai probabilitas 0.187. oleh karena probabilitasnya > 0.05 maka dapat dikatakan terdapat kesamaan varians pada ketiga sampel, dengan demikian asumsi kesamaan varians terpenuhi.

Berdasarkan hasil tes untuk faktor terbatasnya Terbatasnya waktu penugasan dan sumberdaya yang disediakan Bagi Auditro BPK tersebut terlihat bahwa F hitung adalah 2.392 dengan probabilitas 0.011. Oleh karena probabilitas <0.05 atau persepsi ke tiga kelompok (SKPD, anggota DPRD, dan Akademisi) terhadap pernyataan terbatasnya waktu yang disediakan untuk auditor BPKberbeda nyata.

Hubungan Kekeluargaan

Pengujian ini ingin melihat, apakah rata-rata ke tiga kategori responden berasal dari populasi yang sama dengan asumsi varian masing-masing adalah sama. Dari pengujian terlihat bahwa levene tes hitung adalah 2.124 dengan nilai probabilitas 0.136. oleh karena probabilitasnya > 0.05 maka dapat dikatakan terdapat kesamaan varians pada ketiga sampel,

dengan demikian asumsi kesamaan varians terpenuhi.

Berdasarkan hasil tes untuk faktor Hubungan Kekeluargaan tersebut terlihat bahwa F hitung adalah 2.187 dengan probabilitas 0.129. Oleh karena probabilitas >0.05 atau persepsi ke tiga kelompok (SKPD, anggota DPRD, dan Akademisi) terhadap pernyataan independensi dalam biaya audit BPK tidakberbeda nyata.

Adanya kecenderungan untuk memihak, kerena keyakinan politik atau social

Pengujian ini ingin melihat, apakah rata-rata ke tiga kategori responden berasal dari populasi yang sama dengan asumsi varian masing-masing adalah sama. Dari pengujian terlihat bahwa levene tes hitung adalah 1.574 dengan nilai probabilitas 0.222. oleh karena probabilitasnya > 0.05 maka dapat dikatakan terdapat kesamaan varians pada ketiga sampel, dengan demikian asumsi kesamaan varians terpenuhi.

Berdasarkan hasil tes untuk faktor Adanya kecenderungan untuk memihak, kerena keyakinan politik atau social tersebut terlihat bahwa F hitung adalah 3.081 dengan probabilitas 0.060. Oleh karena probabilitas >0.05 atau persepsi ke tiga kelompok (SKPD, anggota DPRD, dan Akademisi) terhadap pernyataan adanya kecenderungan memihak karean keyakinan politi atau sosial tidak berbeda nyata.

Akses terhadap Informasi tanpa hambatan

Pengujian ini ingin melihat, apakah rata-rata ke tiga kategori responden berasal dari populasi yang sama dengan asumsi varian masing-masing adalah sama. Dari pengujian terlihat bahwa levene tes hitung adalah 0.789 dengan nilai probabilitas 0.463. oleh karena probabilitasnya > 0.05 maka dapat dikatakan terdapat kesamaan varians pada ketiga sampel, dengan demikian asumsi kesamaan varians terpenuhi.

Berdasarkan hasil tes untuk faktor Akses terhadap Informasi tanpa hambatan tersebut

terlihat bahwa F hitung adalah 1.647 dengan probabilitas 0.208. Oleh karena probabilitas >0.05 atau persepsi ke tiga kelompok (SKPD, anggota DPRD, dan Akademisi) terhadap pernyataan informasi tanpa hambatan tidakberbeda nyata.

Kebebasan menentukan sendiri materi laporan dan waktu melaporkan serta kebebasan menerbitkan dan menyebarkan laporan-laporan hasil pemeriksaan

Pengujian ini ingin melihat, apakah rata-rata ke tiga kategori responden berasal dari populasi yang sama dengan asumsi varian masing-masing adalah sama. Dari pengujian terlihat bahwa levene tes hitung adalah 2.210. dengan nilai probabilitas 0.126. oleh karena probabilitasnya > 0.05 maka dapat dikatakan terdapat kesamaan varians pada ketiga sampel, dengan demikian asumsi kesamaan varians terpenuhi.

Berdasarkan hasil tes untuk faktor Kebebasan menentukan sendiri materi laporan dan waktu melaporkan serta kebebasan menerbitkan dan menyebarkan laporan-laporan hasil pemeriksaan tersebut terlihat bahwa F hitung adalah 1.854 dengan probabilitas 0.173. Oleh karena probabilitas >0.05 atau persepsi ke tiga kelompok (SKPD, anggota DPRD, dan Akademisi) terhadap pernyataan independensi dalam biaya audit BPK tidakberbeda nyata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi pemakai laporan keuangan (Pimpinan SKPD, Anggota DPRD dan Kalangan Akademisi) mengenai independensi auditor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 7 faktor yang digunakan hanya terdapat 1 faktor yang terjadi perbedaan yaitu factor ketiga "terbatasnya waktu penugasan yang disediakan bagi auditor BPK", dari kalangan anggota DPRD berdasarkan jawaban kuesioner yang dihasilkan menunjukkan bahwa 70% menyatakan bahwa terbatasnya waktu penugasan yang disediakan bagi auditor BPK dapat merusak indeendensi BPK.

Hasil deskripsi variable dalam penelitian ini menunjukkan jawaban atas pemakai laporan keuangan menunjukkan bahwa jawaban atas pemakai laporan keuangan (Pimpinan SKPD, Anggota DPRD dan Kalangan Akademisi) yang berasal dari responden dan terdiri dari 12 item pernyataan. Berdasarkan hasil deskripsi variabel diperoleh gambaran bahwa yang memperoleh skor tertinggi adalah pernyataan nomor item 9 dan 10 yaitu: "Adanya kecenderungan memihak karena keyakinan politik merusak independensi auditor dan Campur tangan pihak eksterent dalam penentuan prosedur pemeriksaan merusak independensi auditor" dengan total skor masing-masing sebesar 140 dan 140.

Berdasarkan hal tersebut sebagian besar responden setuju dengan pernyataan "Adanya kecenderungan memihak karena keyakinan politik merusak independensi auditor dan Campur tangan pihak eksterent dalam penentuan prosedur pemeriksaan merusak independensi auditor". Hal ini tergambar dari hasil tabulasi kuesioner yang dikumpulkan dari responden yang menunjukkan sebagian besar mereka menjawab setuju atas item pertanyaan tersebut. Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa di dalam instansi pemerintahan Campur tangan pihak eksterent dalam penentuan prosedur pemeriksaan merusak independensi auditor.

Pernyataan dengan nomor item 3 yang berbunyi " Anggaran BPK yang bersumber dari APBN merusak Independensi Auditor" merupakan pernyataan yang memiliki skor terendah dengan total skor 100. Pada pernyataan tersebut, sebanyak 2 responden atau 5.7% menjawab sangat setuju, 7 responden atau 20% menjawab setuju, 10 responden atau 28.6% menjawab netral, 16 responden atau 45.7 % menjawab tidak setuju dan 0 responden menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan hal tersebut memberikan gambaran bahwa responden menganggap anggaran BPK yang bersumber dari APBN tidak merusak independensi BPK dapat dilihat dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab tidak setuju atas pernyataan no item

8, hal ini juga menggambarkan bahwa anggaran yang digunakan BPK yang bersumber dari APBN tidak mempengaruhi buruknya independensi BPK.

Hasil perhitungan atas jawaban responden dari kalangan akademisi memberikan gambaran bahwa “terbatasnya waktu penugasan yang disediakan bagi auditor BPK dapat merusak independensi BPK” tidak mempengaruhi independensi auditor BPK, hal tersebut tergambar dari 60% jawaban atas responden menyatakan bahwa terbatasnya waktu penugasan yang disediakan bagi auditor BPK dapat merusak indeendensi BPK tidak mempengaruhi independensi BPK sedangkan sisanya 20% menjawab mempengaruhi dan 20% menjawab netral.

Kalangan SKPD memiliki jawaban yang sama antara mempengaruhi dan tidak mempengaruhi yaitu masing-masing sebesar 38.6% sedangkan sisanya menjawab netral yaitu sebesar 22.7%.

Kesamaan persepsi dari kelompok pemakai laporan keuangan (Pimpinan SKPD, Anggota DPRD dan Akademisi) terhadap independensi BPK disebabkan oleh karena pentingnya hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK selaku Pemeriksa keuangan, dengan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan masing-masing kelompok meskipun memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap laporan keuangan namun hasil pemeriksaan yang dikeluarkan BPK mencerminkan kepatuhan suatu lembaga pemerintah atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, aktivitas dan program yang dilakukan pemerintah telah sesuai asas umum pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui persepsi pemakai laporan keuangan terhadap independensi Badan Pemeriksa Keuangan di Kota Palu sebagai berikut:

1. Persepsi pemakai laporan keuangan (SKPD, Anggota DPRD dan Akademisi) terhadap independensi auditor, berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak terjadi perbedaan yang nyata atas persepsi dari ketiga kelompok pemakai laporan keuangan.
2. Dari 7 faktor yang menjadi indikator atas independensi auditor terdapat satu faktor yang terjadi perbedaan persepsi terhadap independensi auditor yaitu “Terbatasnya waktu penugasan yang disediakan bagi auditor BPK”.

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan menunjukkan bahwa persepsi pemakai laporan keuangan terhadap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya yaitu pada pertanyaan nomor 9 dan nomor 10 yaitu “Adanya kecenderungan memihak karena keyakinan politik merusak independensi auditor dan Campur tangan pihak eksterent dalam penentuan prosedur pemeriksaan merusak independensi auditor. Berdasarkan hasil tersebut kiranya BPK dalam menjalankan tugas harus memperhatikan kedua faktor tersebut agar dapat tetap menjaga independensi dimata pemakai laporan keuangan.
2. Penelitian berikutnya agar dapat mendampingi responden dalam mengisi kuesioner serta melakukan wawancara agar hasil yang dicapai dapat lebih maksimal.
3. Penelitian berikutnya agar dapat menambahkan jumlah sampel dan dengan daerah sebaran yang lebih luas akan membuat penelitian selanjutnya lebih dapat digeneralisasi.

UCAPAN TERIMAH KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

penelitian ini. Penulis akui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. Djayani Nurdin, SE.,M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Abdul Kahar,SE.,M.Si.,Ak. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Bhattacharya, U., H. Daouk, and M. Welker. 2003. The world price of earnings opacity. The Accounting Review.*
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono, 2010. *Statistika untuk Penelitian*, Edisi VI, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Supriyono, R.A. 2008. *Pemeriksaan Akuntan: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik: Suatu Hasil Penelitian Empiris di Indonesia*. Yogyakarta: BPF.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.